



BAHASA MASUK PORTUGIS KURIKULUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA: ANALISI WACANA KRITIS

Rully Sulistyawan P.A ^{a*}, Cindy Angelina Putri Tambunan ^b, Mazaya Elya Sakinah ^c

^a Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra / Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; rullysulistyawan23@upi.edu,
Univesitas Pendidikan Indonesia; Jawa Barat

^b Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra / Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Cindyangelina74@upi.edu,
Univesitas Pendidikan Indonesia; Jawa Barat

^c Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra / Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Mazaya07@upi.edu, Univesitas
Pendidikan Indonesia; Jawa Barat

* Penulis Korespondensi: Rully Sulistyawan P.A

ABSTRACT

This research aims to uncover the representation of power and ideology in media coverage regarding educational policy. The focus of the study is directed at a news article from Kompas.com titled "Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Membebani Siswa" (Portuguese Language Enters the Curriculum, Legislators Fear It Will Burden Students), published on October 25, 2025. The central issue examined is the ideological contestation between the government's discourse on language internationalization and the discourse of academic efficiency voiced by the legislature. This study employs a qualitative approach using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) model. This approach views language as a social practice that maintains a dialectical relationship with social structures and power. Data were collected through literature study and the observation method (metode simak), utilizing digital document recording and repeated reading techniques to identify lexical choices and representational strategies. Data analysis was conducted through Fairclough's three-dimensional framework: textual analysis (linguistic and lexical choices), discourse practice (processes of text production and consumption), and social practice (political context and power relations). The results indicate that the use of dictions such as "khawatir" (worry) and "bebani siswa" (burden students) functions as a framing strategy that represents the policy negatively. Data validity was ensured through theory and source triangulation to verify emerging discourse patterns. Overall, this study concludes that mass media possesses symbolic power in shaping public opinion and constructing social reality through non-neutral linguistic choices. This research contributes to the understanding of the media's role in mediating interest conflicts between policymakers and state institutions.

Keywords: *Critical Discourse Analysis; Norman Fairclough, Kompas.com; Ideology; Educational Policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap representasi kekuasaan dan ideologi dalam pemberitaan media daring mengenai kebijakan pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada berita Kompas.com berjudul "Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Bebani Siswa" yang terbit pada 25 Oktober 2025. Masalah utama yang diangkat adalah pertarungan ideologi antara wacana internasionalisasi bahasa oleh pemerintah dengan wacana efisiensi kurikulum yang disuarakan pihak legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Pendekatan ini memandang bahasa sebagai praktik sosial yang memiliki hubungan dialektis dengan struktur sosial dan kekuasaan. Data dikumpulkan melalui metode pustaka dan simak dengan teknik pencatatan dokumen digital serta pembacaan berulang untuk mengidentifikasi pilihan diksi dan strategi representasi. Analisis data dilakukan melalui tiga dimensi Fairclough: analisis teks (linguistik dan pilihan kata), praktik wacana (proses produksi dan konsumsi teks), serta praktik sosial (konteks politik dan relasi

kekuasaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diksi seperti “khawatir” dan “bebani siswa” berfungsi sebagai strategi pembingkai (framing) yang merepresentasikan kebijakan secara negatif. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi teori dan sumber guna memverifikasi pola wacana yang muncul. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa media massa memiliki kekuatan simbolik dalam membentuk opini publik dan mengonstruksi realitas sosial melalui pilihan bahasa yang tidak netral. Kajian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai peran media dalam menengahi konflik kepentingan antara pembuat kebijakan dan institusi negara.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis; Norman Fairclough; Kompas.com; Ideologi; Kebijakan Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Bahasa tidak pernah netral; ia selalu menjadi medium yang membawa serta ideologi, kekuasaan, dan kepentingan sosial tertentu. Dalam pandangan analisis wacana kritis (AWK), bahasa berperan sebagai praktik sosial yang mencerminkan serta membentuk realitas sosial dan relasi kekuasaan di masyarakat. [1] menegaskan bahwa terdapat hubungan dialektis antara konstruksi tekstual dengan kondisi sosial, institusional, dan ideologis dalam proses produksi serta resepsi teks. Struktur linguistik, menurutnya, digunakan untuk “mensistematisasikan dan mentransformasikan realitas” [5].

Analisis wacana kritis berfungsi mengungkap bagaimana kekuasaan dan ideologi bekerja melalui bahasa. [8] menyatakan bahwa AWK mempelajari bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan “dibuat, diproduksi, dan ditolak melalui teks atau lisan di dalam konteks sosial dan politik.” Oleh karena itu, teks berita, sebagai bentuk wacana publik, menjadi ruang di mana praktik ideologis dan politik dapat diamati secara nyata. Dalam konteks ini, analisis terhadap pemberitaan media massa bukan hanya berfungsi untuk memahami isi berita, tetapi juga untuk menyingkap bagaimana media membingkai suatu peristiwa dan membentuk opini publik.

Media massa memiliki kekuatan simbolik dalam membentuk konstruksi realitas sosial. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan sudut pandang yang dipakai, media dapat memproduksi relasi kekuasaan tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh [5], fenomena komunikasi yang tampak “lebih banyak diwarnai oleh fenomena ketidakaturan, kesenjangan, ketidakseimbangan, dan ketidaknetralan dari isu-isu ketidakadilan dalam gender, politik, ras, media massa, kekuasaan, dan komunikasi lintas budaya.” Dengan demikian, analisis terhadap teks berita dapat mengungkap kepentingan ideologis yang tersembunyi di baliknya.

Berita Kompas.com berjudul “Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Bebani Siswa” menjadi contoh menarik untuk dianalisis melalui pendekatan wacana kritis. Pemberitaan tersebut menampilkan pertarungan ideologi antara wacana kebijakan pendidikan internasionalisasi bahasa dengan wacana domestik yang menekankan beban siswa dan efisiensi kurikulum. Pilihan leksikal seperti “khawatir” dan “bebani siswa” menunjukkan kecenderungan representasi negatif terhadap kebijakan tersebut dan dapat merepresentasikan kepentingan ideologis tertentu di balik teks media.

Dalam kerangka [2], wacana semacam ini dapat dipahami melalui tiga dimensi analisis, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Analisis terhadap teks memungkinkan pengungkapan bentuk linguistik yang digunakan untuk membangun citra dan ideologi; praktik diskursif menelusuri bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi; sedangkan praktik sosial menelaah konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupi wacana tersebut. Pendekatan ini relevan digunakan untuk mengkaji bagaimana media, dalam hal ini Kompas.com, membingkai kebijakan pendidikan yang mengandung implikasi sosial dan politik tertentu.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap representasi kekuasaan dan ideologi dalam pemberitaan Kompas.com mengenai kebijakan memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana media massa berperan dalam membentuk wacana kebijakan pendidikan dan opini publik di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis (AWK) telah bertransformasi menjadi perangkat metodologis utama untuk mengurai peran bahasa sebagai instrumen kendali sosial maupun politik. Pendekatan tiga dimensi yang dikembangkan Fairclough secara sistematis menghubungkan aspek mikro linguistik teks dengan kenyataan

praktik sosial di tingkat makro [3]. Khusus dalam ranah pendidikan, wacana dipandang lebih dari sekadar susunan sintaksis; ia merupakan manifestasi kepentingan dari berbagai institusi yang memproduksi narasi tersebut [4]. Melalui transmisi analisis tekstual, praktik diskursif, dan sosiokultural, peneliti mampu mengungkap bagaimana kebijakan kurikulum dicitrakan oleh media baik sebagai konteks publik yang ideal maupun sebagai beban bagi subjek sekolah tertentu [9].

2.2 Konstruksi Realitas dan Strategi Framing Media Daring

Media massa digital, seperti Kompas.com, memegang peranan penting dalam distribusi ideologi melalui mekanisme pembingkaihan (framing) berita. Teknik ini termanifestasi secara eksplisit dalam struktur organisasi bahasa serta pemilihan leksikal (diksi) pada tajuk utama dan editorial [10]. Sastra kontemporer menunjukkan kecenderungan media berani untuk menonjolkan pernyataan aktor politik, seperti anggota legislatif, guna memperkuat narasi mengenai "kekhawatiran" atau "tekanan" yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan baru [11]. Fenomena ini menegaskan posisi media yang tidak bebas nilai, di mana setiap berita diproduksi di tengah menarikan kepentingan antara penyampai pesan dan pembentukan persepsi masyarakat [12].

2.3 Kedudukan Bahasa sebagai Praktik Sosial dalam Kontestasi Kebijakan

Integrasi bahasa asing ke dalam kurikulum nasional merupakan representasi nyata dari bahasa sebagai praktik sosial yang sarat akan mempengaruhi kekuasaan. Bahasa berperan sebagai modal simbolik yang memiliki kekuatan untuk mengangkat atau memarginalkan kedudukan aktor sosial dalam struktur pendidikan [3]. Kajian terhadap diskursus kurikulum mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan pendidikan sering kali merupakan produk dari ketegangan hubungan kekuasaan antara pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen), menjadikan teks berita sebagai arena utama dalam memperebutkan dominasi kepentingan tersebut [4], [11].

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (AWK). Pendekatan ini menempatkan bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral dan selalu berhubungan dengan kekuasaan, ideologi, serta konteks sosial yang melingkupinya [1,5]. Dalam pandangan Fairclough, terdapat hubungan dialektis antara teks dan struktur sosial yang mempengaruhi proses produksi serta penafsiran makna wacana.

Pendekatan kritis digunakan untuk mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa dalam teks media massa. Sejalan dengan pendapat [8], AWK menitikberatkan pada kajian tentang bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan “dibuat, diproduksi, dan ditolak melalui teks atau lisan di dalam konteks sosial dan politik.”

3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks berita dari portal daring Kompas.com berjudul “Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Beban Siswa” yang terbit pada 25 Oktober 2025. Pemilihan teks ini didasarkan pada pertimbangan bahwa berita tersebut mencerminkan pertarungan ideologi antara kebijakan pemerintah (yang mendorong internasionalisasi bahasa) dengan pihak legislatif (yang menyoroti beban kurikulum) [7].

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode pustaka dan metode simak, sebagaimana digunakan oleh [6]. Langkah-langkahnya meliputi:

- Mengakses teks berita dari laman resmi [Kompas.com](https://www.kompas.com).
- Menyalin teks berita ke dalam bentuk dokumen digital untuk dianalisis.
- Membaca teks secara berulang guna menemukan struktur kebahasaan, pilihan diksi, dan strategi representasi ideologi.
- Mencatat serta mengelompokkan data yang berkaitan dengan unsur kekuasaan, ideologi, dan posisi aktor sosial.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model tiga dimensi [1,2], yakni:

a. Analisis Teks (Text Analysis)

Menelaah struktur linguistik dalam teks, meliputi pilihan kata (bebani siswa, khawatir), bentuk kalimat, dan struktur tematik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi representasi ideologi melalui bahasa.

b. Analisis Praktik Wacana (Discourse Practice)

Mengkaji bagaimana teks diproduksi, disebar, dan dikonsumsi. Tahap ini menelusuri hubungan antara media (sebagai institusi) dan sumber wacana (pemerintah, DPR, publik), termasuk bagaimana framing berita dibentuk.

c. Analisis Praktik Sosial (Social Practice)

Menganalisis konteks sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi teks. Analisis ini mengaitkan pemberitaan dengan relasi kekuasaan antara pembuat kebijakan dan lembaga legislatif, serta dampaknya terhadap persepsi publik.

3.5 Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi teori dan sumber, dengan membandingkan hasil analisis terhadap teori Fairclough, Van Dijk, dan Wodak serta meninjau pemberitaan serupa dari media lain untuk memverifikasi pola wacana dan framing yang muncul.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dinamika penting yang selalu menjadi pusat perhatian publik saat ini adalah wacana kebijakan pendidikan. Bagaimana sebuah kebijakan baru, seperti kurikulum, yang disajikan oleh media akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal mencermati dan mengkritisi wacana yang beredar, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai informasi konsumen.

Salah satu elemen utama yang mempunyai tanggung jawab (dan kekuatan) untuk mempublikasikan wacana kebijakan baru ini adalah media massa. Ketika ada sebuah rencana kebijakan baru, seperti "Bahasa Portugis Masuk Kurikulum", media massa yang menjadi corong terdepan dalam memberitakannya.

Di sisi lain, massa media juga tidak hanya memberitakan fakta, tetapi juga akan mengambil sikap dan memberikan bingkai (frame) tertentu terhadap peristiwa tersebut. Sikap atau bingkai yang diambil oleh massa media akan sangat terlihat jelas dalam tajuk beritanya, misalnya dalam kasus "*Legislator Khawatir Akan Membebani Siswa*".

Pada bagian ini akan dipaparkan analisis wacana kritis terhadap judul berita terkait kebijakan pendidikan di media masa berbahasa Indonesia. Analisis ini akan menyoroti bagaimana wacana tersebut dibingkai, yakni apakah dengan bingkai mengkritisi kebijakan (seperti dalam tajuk "*Legislator Khawatir Akan Membebani Siswa*") atau sebaliknya, dengan bingkai mendukung kebijakan tersebut (yang mungkin melihatnya sebagai peluang).

Dalam praktik massa media, pembingkai (framing) merupakan transformasi ideologi, visi, atau keberpihakan institusi media yang sangat tampak terungkap dalam struktur dan penggunaan bentuk-bentuk ekspresi bahasa pada wacana editorial (Subagyo, 2012).

4.1 Analisis Teks (Text Analysis)

Analisis wacana kritis ini fokus pada "**bingkai mengkritisi kebijakan**" yang tecermin dari sikap dan pandangan narasumber yang dikutip media. Dalam hal ini, narasumber menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana kebijakan Bahasa Portugis dalam kurikulum. Ketidaksetujuan tersebut dilandasi oleh beberapa argumen: potensi **beban bagi siswa dan pendidik**, masalah **kesiapan anggaran dan SDM**, serta **keraguan atas prioritas dan urgensi** kebijakan itu sendiri.

Dalam teks berita yang menjadi sumber data (yang melatari editorial "*Legislator Khawatir Akan Beban Siswa*"), ditemukan wacana dengan bingkai mengkritisi kebijakan tersebut. Data yang dapat diamati adalah:

(1) *Kalaupun dipelajari di Sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa begitu pula pendidik karena pasti perlu pengajar bahasa Portugis.* (2) *Bahasa Portugis itu bukan bahasa pergaulan internasional. Bukan pula bahasa umum pengetahuan yang digunakan di kalangan akademik. Mungkin Presiden sedang meng-hibur Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi.*

Data (1) yang merupakan penggalan wacana berita Kompas, secara struktur termasuk dalam **Kalimat Majemuk Bertingkat (Campuran)**. Kalimat ini secara gamblang menunjukkan sikap kritis media dengan mengelaborasi mengapa kebijakan itu dianggap sebagai "**beban**". Beban tersebut diidentifikasi muncul dari dua faktor: (1) statusnya yang "**wajib**" dan (2) konsekuensi logistiknya, yaitu "**perlu pengajar baru**", yang secara langsung menyiratkan masalah biaya dan ketersediaan SDM.

Sementara itu, dalam data (2), redaktur Kompas (melalui kutipan narasumber) memperkuat kritik dengan menggunakan dua strategi delegitimasi. Pertama, **Mendelegitimasi Nilai Kebijakan**; dengan menyatakan Bahasa Portugis "bukan bahasa pergaulan" atau "bahasa akademik," narasumber berargumen bahwa kebijakan ini tidak strategis dan tidak esensial bagi siswa. Kedua, **Mendelegitimasi Motif Pembuat Kebijakan**; dengan maksud bahwa ini hanya untuk "menghibur Presiden Lula," kebijakan tersebut tidak didasarkan pada analisis kebutuhan pendidikan, melainkan hanya diplomasi politik pada saat itu.

Menariknya, bingkai yang dipakai oleh narasumber (legislator) ini tidak hanya berisi kritik total, tetapi juga **mendukung bersyarat (sebagai solusi alternatif)** jika statusnya diubah menjadi opsional. Kritik ini mengacu pada dua argumen utama yang terlihat pada data berikut:

(3) Menurut Bonie, pembelajaran Bahasa Portugis ini tidak akan menjadi beban para siswa jika bersifat sebagai ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan. (4) Bahasa Portugis itu bukan bahasa pergaulan internasional.

Dalam data (3), maksud dari argumen ini adalah untuk **menawarkan solusi alternatif atau kompromi**. Ini adalah strategi di mana nara menunjukkan bahwa masalah utamanya bukanlah Bahasa Portugis itu sendiri, melainkan status "**wajib**"-nya.

Argumen kompromi ini kemudian diperkuat oleh data (4), yang berfungsi untuk **mendelegitimasi (meragukan) nilai dan urgensi** dari kebijakan tersebut. Dengan menyatakan Bahasa Portugis "bukan bahasa pergaulan internasional," narasumber menegaskan bahwa bahasa ini tidak memiliki nilai strategi yang tinggi (dibandingkan, misalnya, dengan Bahasa Inggris atau Mandarin), sehingga tidak ada alasan kuat untuk melaksanakannya.

Terakhir, analisis juga menyoroti **Keraguan terhadap Kesiapan Sumber Daya (SDM dan Anggaran)**. Pada data (5) terdapat kalimat: *Bonnie mengoceh soal kebutuhan staf pengajar atau guru yang akan mengajarkan bahasa Portugis kepada para siswa.*

Secara struktur, kalimat tersebut merupakan **Kalimat Majemuk Bertingkat (Kalimat Kompleks)**. Namun, di balik struktur itu, poin penting dari Analisis Wacana Kritis (AWK) justru terletak pada **Bingkai (Frame) Jurnalis**. Pilihan kata yang digunakan jurnalis, yaitu "**mengoceh**", sangat krusial. "Mengoceh" (berceloteh, meracau, atau mengomel) adalah kata yang **tidak netral** dan cenderung **bersifat negatif**. Dengan menggunakan kata "mengoceh" alih-alih kata netral seperti "mempertanyakan" atau "menyampaikan", jurnalis (mungkin secara tidak sadar) membingkai kritik Bonnie sebagai sesuatu yang berisik, tidak substantif, atau sekadar omelan. Tindakan pemingkai oleh jurnalis ini meremehkan bobot kritik yang disampaikan narasumber.

4.2 Analisis Praktik Wacana (Discourse Practice)

a. Produksi Teks (Oleh Kompas)

Analisis ini melihat "dapur redaksi" Kompas dan rutinitas jurnalisisme yang menghasilkan editor tersebut.

1. **Pemilihan Narasumber (Akses):** Praktik jurnalisisme Kompas, sebagai media *mainstream*, sangat mengandalkan sumber elite yang memiliki otoritas. Legislator (Anggota DPR) adalah sumber elite utama. Suara mereka dianggap memiliki "bobot" dan "nilai berita" yang tinggi.
2. **Pembungkaman Suara (Marginalisasi):** Dalam proses produksi ini, suara-suara lain dipinggirkan karena dianggap tidak memiliki nilai tertinggi "konflik politik". Suara yang dibungkam dalam tajuk ini adalah:
 - a. Siswa: Objek yang "terbebani" ini tidak diberi suara untuk mengonfirmasi apakah mereka benar-benar merasa terbebani.
 - b. Ahli Pendidikan/Bahasa: Tidak ada ruang bagi akademisi untuk menjelaskan *manfaat* atau *peluang* dari Bahasa Portugis.

- c. Pemerintah (Eksekutif): Alasan atau argumen positif dari pihak pemerintah (Presiden) tidak mendapat tempat di editorial.

3. Nilai Berita (News Value): Tajuk ini dipilih oleh editor *Kompas* karena memenuhi setidaknya dua nilai berita utama:

- Konflik: Menghadirkan pertentangan antara Legislator (DPR) vs Pemerintah (Presiden).
- Dampak/Human Interest: Menggunakan kata “beban siswa”, yang langsung menyentuh emosi pembaca (terutama orang tua).

4. Bingkai (Framing): *Kompas* secara sadar (atau tidak sadar karena rutinitas) memilih membingkai "Masalah" (Masalah Bingkai). Kebijakan ini tidak dibingkai sebagai "Peluang Global" atau "Inovasi Pendidikan", melainkan sebagai "Beban Baru".

b. Distribusi Teks

Analisis ini melihat bagaimana berita tersebut disebar oleh *Kompas* untuk menjangkau audiens.

- Konteks Media Online:** *Kompas.com* (sebagai media online) sangat bergantung pada klik dan engagement (keterlibatan pembaca). Tajuk yang mengandung "Konflik" (Legislator) dan "Emosi Negatif" (Khawatir, Beban) jauh lebih "dapat diklik" (layak klik) daripada tajuk yang netral atau positif.
- Penyebaran Media Sosial:** Tajuk ini didesain untuk mudah disebarluaskan di platform seperti X (Twitter) atau Facebook, di mana ia akan memicu terjadinya dan komentar. Praktik distribusi ini sengaja memanfaatkan polarisasi di masyarakat untuk memperluas jangkauan berita.

c. Konsumsi Teks (Oleh Pembaca)

Analisis ini melihat bagaimana pembaca *Kompas* (audiens) menerima dan menafsirkan berita ini.

- Konteks Pembaca:** Audiens di Indonesia secara umum sudah memiliki skema kognitif (pra-anggapan) bahwa "ganti menteri/presiden" sering berarti "ganti kurikulum" dan "menambah beban siswa".
- Tafsiran Dominan (Hegemonik):** Pembaca akan sangat mudah menerima bingkai yang disajikan *Kompas*. Pembaca umum akan langsung setuju dan berpikir, "Benar sekali, kasihan siswa, pemerintah ini hanya menambah-nambah beban saja." Praktik wacana *Kompas* berhasil mereproduksi ideologi bahwa kurikulum baru = beban.
- Tafsiran Oposisi (Melawan):** Sebagian pembaca kecil (misalnya sejarawan, diplomat, atau pebisnis global) mungkin akan menolak bingkai ini. Mereka akan berpikir, "Legislator ini picik. Ini peluang strategi untuk hubungan dengan Brasil atau Timor Leste. Kenapa *Kompas* hanya menyoroti sisi negatifnya?"
- Tafsiran Negosiasi:** Pembaca mungkin menerima sebagian dan menolak sebagian. "Idenya (Bahasa Portugis) bagus, tapi kekhawatiran legislator soal (status) *wajib* -nya juga masuk akal. Mungkin sebaiknya dijadikan pilihan saja."

1. Analisis Praktik Sosial (Social Practice)

a. Konteks Sosial Politik

Kebijakan untuk memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum berkaitan dengan agenda internasionalisasi, diplomasi ekonomi atau kebijakan bahasa asing. Namun, dalam konteks Indonesia, kurikulum sering dianggap sudah berat oleh siswa dan orang tua, sehingga muncul resistensi ketika pelajaran baru diumumkan. Media memanfaatkan konteks ini dengan menyoroti kekhawatiran legislator.

b. Relasi Kekuasaan dan Ideologi

Media memainkan peran sebagai penjematan antara pembuat kebijakan dan publik dalam hal ini memilih sudut kritik sebagai representasi legislator. Legislator sebagai aktornya berada dalam posisi pengawas atau penyeimbang pemerintah, berita menunjukkan bagaimana mereka “khawatir” akan beban siswa, dengan demikian menunjukkan fungsi kontrol legislasi. Ideologi yang muncul: bahwa siswa adalah pihak yang mesti dilindungi dari kebijakan yang memberatkan; kurikulum harus dilihat juga dari sisi beban dan bukan hanya manfaat.

c. Dampak Sosial dan Implikasi

Judul berita seperti ini dapat meningkatkan resistensi publik terhadap kebijakan tersebut, orang tua dan siswa bisa merasa suara mereka didengar melalui legislator, tetapi juga bisa menjadi blokade bagi inovasi pendidikan jika hanya dilihat sebagai beban.

Jika implementasi kebijakan tersebut dilakukan tanpa pengaturan yang matang, media seperti ini bisa mempengaruhi persepsi bahwa kebijakan adalah gagal sebelum diuji.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis pada berita "Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Membebani Siswa" yang dimuat oleh kompas.com, dapat disimpulkan bahwa berita tersebut merepresentasikan relasi kekuasaan dan ideologi antara pemerintah dengan pihak pengkritik. Pemilihan judul, diksi, hingga struktur kalimat oleh Kompas.com menunjukkan sudut pandang yang lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Bingkai (framing) yang digunakan memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut problematis dan belum memiliki dasar yang kuat untuk kebutuhan pendidikan nasional. Meskipun begitu, wacana tersebut tidak sepenuhnya menantang kebijakan, melainkan menyiratkan dukungan bersyarat apabila kebijakan tersebut menjadi opsional, bukan wajib. Dapat disimpulkan bahwa media berperan penting dalam membentuk opini publik melalui representasi yang digunakan dalam pemberitaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Fairclough, Bahasa dan Kekuasaan . London, Inggris: Longman, 1989.
- [2] N. Fairclough, Analisis Wacana Kritis: Studi Kritis Bahasa . London, Inggris: Longman, 1995.
- [3] N. Fairclough, Analisis Wacana Kritis: Studi Kritis Bahasa . London, Inggris: Longman, 1995.
- [4] Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media . Yogyakarta, Indonesia: LKiS, 2011.
- [5] U. Fauzan, "Analisis Wacana Kritis Model Fairclough," Akademika , vol. 8, tidak. 2, hal.1-13, 2014.
- [6] H. Hariyani dan HB Mardikantoro, "Pembentukan Reputasi Calon Presiden 2014 dalam Berita di Media Massa Online: Kajian Wacana Kritis," Lingua: Jurnal Bahasa dan Sastra , vol. 12, tidak. 2, hal.173-183, 2014. [Online]. Tersedia:<https://doi.org/10.15294/lingua.v12i2.9087>.
- [7] A. Subagyo, "Framing dalam Wacana Editorial," Jurnal Ilmu Komunikasi , vol. 10, tidak. 2, hlm. 149-160, Agustus 2012.
- [8] TA Van Dijk, "Analisis Wacana Kritis Multidisiplin: Seruan untuk Keberagaman," dalam Metode Analisis Wacana Kritis , vol. 1, hlm. 95-120, 2001.
- [9] T. Sobari, dkk., "Analisis Wacana Kritis Kajian Norman Fairclough dalam Wacana 'Turbulensi Kurikulum Merdeka'," Ranah: Jurnal Kajian Bahasa , vol. 14, tidak. 1, hal.247-254, 2025.
- [10] R. Muffidah, N. Anggraini, and IA Purawinangun, "Representasi Kekuasaan Negara dalam Dokumen Kurikulum Merdeka: Analisis Wacana Kritis," Jurnal Tinta , vol. 5, tidak. 2, hal.15-28, 2023.
- [11] A. Kurniawati, "Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Berita 'Gegara Bandel Study Tour SMAN 6 Depok Berujung Diaudit Pemprov'," Idebahasa , vol. 5, tidak. 1, hal.122-134, 2023.
- [12] K. Khotimah dan K. Khotimah, "Wacana Kritis Norman Fairclough Berita Media Massa Daring: Jepang Buang Limbah Nuklir," Jurnal Sastra , vol. 12, tidak. 1, hal.45-56, 2024.
- [13] R. Rahmalia and A. Hamdani, "Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Teks Berita di Buku Bahasa Indonesia," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , vol. 11, tidak. 10, hal.105-118, 2025.
- [14] Purwanti, A. Gunawan, dan JIS Dewi, "Penamaan Ibu Kota Nusantara pada Media Massa Daring: Kajian Analisis Wacana Norman Fairclough," dalam Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni , hal. 141-143, 2023.
- [15] Kompas.com, "Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Bebani Siswa," Kompas.com , 21 Mei 2021. [Online]. Tersedia:<https://www.kompas.com>.